



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 11 Seri A.3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 semula Rp.712.603.004.705,00- bertambah sejumlah Rp. 43.044.393.926,39 sehingga menjadi Rp 755.647.398.631,39 dengan rincian sebagai berikut :

|    |                                      |     |                    |     |                      |
|----|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 1. | Pendapatan                           |     |                    |     |                      |
| a. | Semula                               | Rp. | 591.108.789.400,00 |     |                      |
| b. | Bertambah/(berkurang)                | Rp. | 18.887.271.607,00  |     |                      |
|    | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  |     |                    | Rp. | 609.996.061.007,00   |
| 2. | Belanja                              |     |                    |     |                      |
| a. | Semula                               | Rp. | 712.603.004.705,00 |     |                      |
| b. | Bertambah/(berkurang)                | Rp. | 43.044.393.926,39  |     |                      |
|    | Jumlah Belanja setelah Perubahan     |     |                    | Rp. | 755.647.398.631,39   |
|    | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan  |     |                    | Rp. | (145.651.337.624,39) |
| 3. | Pembiayaan                           |     |                    |     |                      |
| a. | Penerimaan                           |     |                    |     |                      |
|    | 1) Semula                            | Rp. | 121.494.215.305,00 |     |                      |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)             | Rp. | 24.157.122.319,39  |     |                      |
|    | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  |     |                    | Rp. | 145.651.337.624,39   |
| b. | Pengeluaran                          |     |                    |     |                      |
|    | 1) Semula                            | Rp. | -                  |     |                      |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)             | Rp. | -                  |     |                      |
|    | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan |     |                    | Rp. | -                    |

| <b>Pasal 2</b> |   |  |     |                       |
|----------------|---|--|-----|-----------------------|
| (1)            | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :                               |  |     |                       |
|                | a.  | Pendapatan Asli Daerah   |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp. | 67,327,988,400.00     |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 20,614,939,685.00     |
|                |   | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan                    |     | Rp. 87,942,928,085.00 |
|                | b.  | Dana Perimbangan   |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp. | 465,460,145,000.00    |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | (5,852,307,942.00)    |
|                |   | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan                          |     | Rp 459,607,837,058.00 |
|                | c.  | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah                               |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp. | 58,320,656,000.00     |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 4,124,639,864.00      |
|                |   | Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan      |     | Rp. 62,445,295,864.00 |
| (2)            | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : |  |     |                       |
|                | a.  | Pajak Daerah   |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp. | 6,746,800,000.00      |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 117,852,208.00        |
|                |   | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan                              |     | Rp. 6,864,652,208.00  |
|                | b.  | Retribusi Daerah   |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp. | 4,683,450,000.00      |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 402,520,000.00        |
|                |   | Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan                          |     | Rp. 5,085,970,000.00  |
|                | c.  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                  |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp. | 7,738,500,000.00      |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | (45,067,128.00)       |
|                |   | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan           |     | Rp. 7,693,432,872.00  |
|                | d.  | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                          |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp. | 48,159,238,400.00     |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 20,139,634,605.00     |
|                |   | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |     | Rp. 68,298,873,005.00 |
| (3)            | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :       |  |     |                       |
|                | a.  | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak                                  |     |                       |
|                |   | 1) Semula  | Rp  | 11,690,237,000.00     |
|                |   | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp  | 860,643,058.00        |
|                |   | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan                           |     | Rp 12,550,880,058.00  |
|                | b.  | Dana Alokasi Umum  |     |                       |

|                |  |     |                    |                        |
|----------------|--|-----|--------------------|------------------------|
| c.             | Dana Alokasi Khusus  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp  | 71,620,414,000.00  |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp  | 187,000.00         |                        |
|                | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan   | Rp. |                    | 71,620,601,000.00      |
| (4)            | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                        |     |                    |                        |
|                | huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :  |     |                    |                        |
| a.             | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya                              |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp  | 15,384,288,000.00  |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp  | 3,824,639,864.00   |                        |
|                | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan   | Rp. |                    | 19,208,927,864.00      |
| b.             | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp  | 42,836,368,000.00  |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp  | -                  |                        |
|                | Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan  | Rp. |                    | 42,836,368,000.00      |
| c.             | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                                  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp  | 100,000,000.00     |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp  | 300,000,000.00     |                        |
|                | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah perubahan  | Rp. |                    | 400,000,000.00         |
| <b>Pasal 3</b> |  |     |                    |                        |
| (1)            | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :                               |     |                    |                        |
| a.             | Belanja Tidak Langsung   |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 219,067,024,295.00 |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | (1,908,909,088.61) |                        |
|                | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan  |     |                    | Rp. 217,158,115,206.39 |
| b.             | Belanja Langsung   |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 493,535,980,410.00 |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 44,953,303,015.00  |                        |
|                | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan  | Rp. |                    | 538,489,283,425.00     |
| (2)            | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja : |     |                    |                        |
| a.             | Belanja Pegawai  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 211,355,739,639.00 |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | (1,759,809,632.61) |                        |
|                | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   | Rp. |                    | 209,595,930,006.39     |
| b.             | Belanja Hibah  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 4,650,837,200.00   |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 1,040,200,000.00   |                        |
|                | Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan   | Rp. |                    | 5,691,037,200.00       |
| c.             | Belanja Bantuan Sosial   |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | -                  |                        |

|                |  |     |                    |                        |
|----------------|--|-----|--------------------|------------------------|
| d.             | Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa                  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 560,000,000.00     |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | -                  |                        |
|                | Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan  |     |                    | Rp. 560,000,000.00     |
| e.             | Belanja Tidak Terduga  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 2,500,447,456.00   |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | (1,500,447,456.00) |                        |
|                | Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan   |     |                    | Rp. 1,000,000,000.00   |
| (3)            | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja : |     |                    |                        |
| a.             | Belanja Pegawai  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 17,247,881,320.00  |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 531,762,960.00     |                        |
|                | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   |     |                    | Rp. 17,779,644,280.00  |
| b.             | Belanja Barang dan Jasa  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 187,220,897,036.00 |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 32,880,241,701.00  |                        |
|                | Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan   |     |                    | Rp. 220,101,138,737.00 |
| c.             | Belanja Modal  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 289,067,202,054.00 |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 11,541,298,354.00  |                        |
|                | Jumlah Belanja Moda setelah Perubahan  |     |                    | Rp. 300,608,500,408.00 |
| <b>Pasal 4</b> |  |     |                    |                        |
| (1)            | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :                      |     |                    |                        |
| a.             | Penerimaan sejumlah  |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 121,494,215,305.00 |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 24,157,122,319.39  |                        |
|                | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  |     |                    | Rp. 145,651,337,624.39 |
| b.             | Pengeluaran sejumlah   |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | -                  |                        |
|                | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | -                  |                        |
|                | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan   |     |                    | Rp. -                  |
| (2)            | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :    |     |                    |                        |
|                | SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :   |     |                    |                        |
|                | 1) Semula  | Rp. | 121,494,215,305.00 |                        |

|     |   |     |         |       |
|-----|---|-----|---------|-------|
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pem - |     |         |       |
|     | biayaan :   |     |         |       |
| a.  | Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah sejumlah                       |     |         |       |
|     | 1) Semula   | Rp. | -       |       |
|     | 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | _____ - |       |
|     | Jumlah Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah setelah Perubahan       |     |         | Rp. - |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi.
- Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
- Lampiran XI : Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
- Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6



**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Oktober 2017

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**d.t.o.**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Oktober 2017

**Pt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**d.t.o**

**INDRA GUSNADY**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT  
: (4/142/2017).**